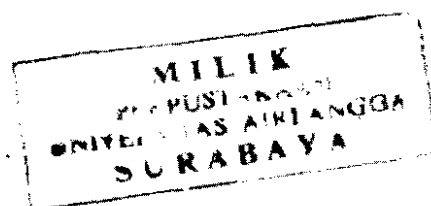


HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT - DAERAH

(Kajian tentang Paradigma Baru Otonomi Daerah Berdasarkan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999
Terhadap Peningkatan Sumber Pendapatan Bagi Dati II
Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI



Oleh :

MAHMUD JUNAIDI

NIM : 079514952

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Semester Genap 1999/2000**

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PJSAT - DAERAH

(Kajian tentang Paradigma Baru Otonomi Daerah Berdasarkan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999
Terhadap Peningkatan Sumber Pendapatan Bagi Dati II
Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Salah satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Oleh :

MAHMUD JUNAIDI

NIM : 079514952

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
Semester Genap 1999/2000

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan untuk diujikan

Surabaya, 4 Juli 2000



Dra. Siti Aminah .MA
NIP. 131 836 624

*Tak ada gunanya mati jika Anda tidak menghantui ingatan
seseorang.....jika Anda tidak meninggalkan secercah rasa.*

(Peter Ustinov, *Aftertaste*, 1958)

Nosce te ipsum.....

ABSTRAKSI

Pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik sebagai dampak positif dari reformasi total yang ditindak lanjuti dengan lahirnya UU No.22/Tahun 1999 dan UU No.25/Tahun 1999 diharapkan membawa perubahan kepada kehidupan Pemerintah Daerah yang dapat mewujudkan *Good Governance* dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya secara keseluruhan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam kedua UU tersebut memuat harapan yang sangat tinggi dari pemerintah yang realisasinya tentu saja membutuhkan komitmen semua pihak baik pemerintah daerah dan warganya, maupun (ini yang penting dan utama) dari pemerintah pusat sendiri.

Namun setiap UU yang begitu ideal tujuannya seringkali berhenti pada tataran implementasinya, karena UU tersebut ternyata dinilai masih banyak yang bias kepentingan pusat dan kurang memperhatikan kepentingan yang berkembang di daerah.

Apabila berbicara tentang kedua undang-undang tersebut banyak hal yang perlu dicermati, dalam mengimplementasi kedua undang-undang tersebut nantinya, termasuk mengkaji ulang paradigma otonomi daerah yang ada dalam undang-undang tersebut dan sejauh mana memberikan peluang yang besar bagi daerah-daerah terutama di dalam memanfaatkan undang-undang tersebut sebagai langkah desentralisasi yang mengacu pada kedudukan Daerah Tingkat II.

Salah satu dimensi untuk mengevaluasi paradigma otonomi daerah yang ada dalam UU No.22/Tahun 1999 dan UU No.25/Tahun 1999 adalah dengan mencoba mengkaji salah satu sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yaitu pendapatan asli daerah, yang juga merupakan bagian penting dalam upaya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kajian mengenai pendapatan asli daerah selalu menarik karena di dalamnya terdapat gerakan saling tarik menarik antara kepentingan pusat – Pemerintah Daerah Tingkat I – Pemerintah Daerah Tingkat II.

Untuk itu, ketika berbicara lebih aplikatif di Sidoarjo, berarti juga harus melihat dimana sebenarnya kedua UU tersebut akan bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Dati II Sidoarjo. Secara empirik Dati II Sidoarjo, seperti a Pemerintah Dati II pada umumnya, masih banyak menghadapi kendala dalam menggali dan mengoptimalkan potensi objek pendapatan asli daerahnya, karena itu harus segera dicarikan jalan keluarnya agar Pemda Tingkat II Sidoarjo benar-benar mampu meningkatkan sumber penerimaan daerahnya, sehingga dengan demikian akan juga dapat meningkatkan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.